

# **IMPLEMENTASI *OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM* DALAM ADMINISTRASI PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**

**(Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)**

Bobby Tri Setiawan

Pembimbing: 1. Luttfi Efendi S.H.,M.H

2. Agus Yulianto S.H.,M.H

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: bybobyb@gmail.com

## **Abstraksi**

Universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya memiliki berbagai macam sistem dalam menjalankan kegiatannya, termasuk salah satunya adalah sistem administrasi keuangan yang bersumber dari Hukum Administrasi Negara dalam hal peraturan - peraturan hukum yang mengatur berjalannya sistem administrasi keuangan tersebut, dimana hal tersebut adalah penghubung antara negara, penyelenggara pendidikan dan peserta didik di dalam melaksanakan masing - masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari kelembagaan pendidikan, universitas memiliki beberapa fakultas dan program studi yang berada dibawahnya, dimana fakultas dan program studi tersebut memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan - kebijakannya sesuai garis aturan dan kriteria yang secara umum diberikan oleh universitas. Salah satu kebijakan yang dilakukan secara independen oleh fakultas adalah dalam hal administrasi biaya pendidikan yang penarikannya diberlakukan dengan cara *official assessment system*.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah, bahwa penerapan administrasi pembayaran biaya pendidikan adalah sudah sesuai dengan aturan - aturan yang berlaku dalam pelaksanaannya,

namun ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat penerapan *official assessment system* dalam penarikan biaya pendidikan tersebut, diantaranya adalah kebijakan mengenai adanya penundaan pembayaran, namun hal tersebut dapat diatasi dengan komitmen yang harus dijalankan oleh pihak fakultas dan mahasiswa.

Harapan dari penelitian mengenai *official assessment system* ini adalah agar dapat ditinjau secara lebih mendalam mengenai penerapan suatu sistem penarikan biaya pendidikan, sehingga penerapan sistem tersebut dapat berjalan serta dapat dilakukan pengawasan agar sesuai aturan - aturan dan *rule* yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

### **Abstract**

University as one of the educational institutions must have a wide variety of systems in carrying out its activities , including the one of which is the financial administration system sourced from the State Administration Law in terms of legal rules governing the passage of the financial administration system , where it is the link between the state , the education provider and learners in the respective implementing - their rights and obligations that must be met . As part of the educational institution , the university has several faculties and courses that are below it , where the faculty and the course has the authority to determine its own policies appropriate rules and criteria lines are generally provided by the university . One of the policies carried out independently by the faculty is in terms of administrative costs imposed withdrawal education by way of official assessment system .

The results obtained from the study is , that the application of the administrative payment of tuition fees is already in accordance with the rules that apply in its implementation , but there are

some obstacles that the limiting factor in the application of the official assessment system withdrawal of the cost of education , including the policy regarding payment delays , but it can be overcome with a commitment that should be taken by the faculty and students .

Expectations of research on the official assessment of this system is to be reviewed in more depth about the withdrawal of the application of a system of education costs , so that the system can run the application and supervision can be done to fit the rules and the rules that apply so there is no deviation conducted by irresponsible parties.

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Hukum Administrasi Negara merupakan aturan yang berada di ranah publik untuk menentukan ataupun mengatur suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang ditujukan dan berpengaruh untuk kalangan secara umum atau universal. Pembentukan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik tersebut berasal dari ketentuan yang diatur oleh Undang - Undang ataupun melalui Peraturan - Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ada beberapa karakteristik dari Hukum Administrasi Negara dimana salah satunya adalah penentuan kebijakan oleh pejabat publik yang dikeluarkan berdasarkan kewenangannya atas suatu bidang tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan terkait dengan keuangan negara dan segala sesuatu yang mengatur tentang administrasi penarikan dan pengelolaannya.

Universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya memiliki berbagai macam sistem dalam menjalankan kegiatannya, termasuk salah satunya adalah sistem administrasi keuangan yang bersumber dari Hukum Administrasi Negara dalam hal peraturan - peraturan

hukum yang mengatur berjalannya sistem administrasi keuangan tersebut, dimana hal tersebut adalah penghubung antara negara, penyelenggara pendidikan dan peserta didik di dalam melaksanakan masing - masing hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai bagian dari kelembagaan pendidikan, universitas memiliki beberapa fakultas dan program studi yang berada dibawahnya, dimana fakultas dan program studi tersebut memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan - kebijakannya sesuai garis aturan dan kriteria yang secara umum diberikan oleh universitas. Salah satu kebijakan yang dilakukan secara independen oleh fakultas adalah dalam hal administrasi biaya pendidikan yang penarikannya diberlakukan dengan cara *official assessment system*. Sehingga pihak fakultaslah yang berperan aktif dalam sistem administrasi tersebut, sehingga segala sesuatu mengenai kebijakan termasuk jumlah dan tata cara pembayaran biaya pendidikan ditentukan secara sepihak oleh fakultas.

Mengingat administrasi keuangan adalah menyangkut segala sesuatu terhadap kegiatan perputaran keuangan, khususnya dalam hal ini adalah keuangan fakultas yang berasal dari pembayaran biaya pendidikan, pastilah ada sistem baku yang diterapkan oleh fakultas melalui pegawainya yang berwanang menjalankan sistem tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan terhadap penerapan sistem yang sudah diatur secara baku tersebut, sehingga dalam hal ini ada suatu aturan yang harus dijalankan secara ideal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang komperhensif mengenai **Implementasi *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan (Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

- Apa dasar aturan pelaksanaan administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang menggunakan *official assessment system*
- Bagaimana penerapan *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan . Yuridis karena menggunakan Peraturan Perundang - undangan sebagai kodifikasi peraturan di Indonesia dan Sosiologis karena masalah ini berkaitan langsung dengan keadaan yang sebenarnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang menerapkan *official assessment system* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

- Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari:

a. Data Primer,yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari responden di lapangan yaitu pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang.

b. Data Sekunder,yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema yang dalam penelitian ini.

- Sumber Data

- Data Primer,diperoleh langsung dari lapangan (pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang)
- Data Sekunder,yaitu data studi pustaka yang diperoleh secara teknis dari sumber bacaan pada Perpustakaan kota Malang,Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang,PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,Penelusuran Internet,Penelusuran Undang-undang,Kamus Hukum,maupun tulisan-tulisan dalam bentuk bahan yang sesuai dengan tema yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dan akan dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara.

- Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, penelusuran internet, kliping koran dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran undang-undang.

## **5. Populasi dan Sampel**

- Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Terdiri dari Pegawai, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang.
- Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive sampel, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel terpilih melalui permasalahan yang dikaji.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang kemudian terhadap masalah yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan undang-undang yang berlaku.

## **• Hasil dan Pembahasan**

## **D.1. Dasar Penerapan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang**

Penarikan biaya administrasi pendidikan di Universitas Brawijaya Kota Malang telah ditentukan dengan ditetapkan dan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Brawijaya untuk disampaikan kepada Pembantu Rektor Universitas Brawijaya, Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Brawijaya, Ketua Program di Lingkungan Universitas Brawijaya, Kepala Bagian Akademik Universitas Brawijaya, Ketua Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Universitas Brawijaya untuk dapat melaksanakan isi dari Surat Keputusan yang menetapkan besaran biaya pendidikan di tiap - tiap fakultas yang berbeda - beda dengan disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing - masing fakultas. Adapun dasar pertimbangan dari Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tersebut adalah dengan mengingat :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
- UU No. 15 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- Kepres No. 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawujaya Periode 2010 - 2014
- Kemendiknas N0 : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya



- Keputusan Rektor No. 074 / SK / 2006 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Brawijaya
- Surat Pengesahan DIPA BLU No. DIPA.023.042.414 989 / 2013 tanggal 5 Desember 2012
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal

## **D.2. Penerapan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang**

Pemberlakuan *Official Assessment System* dalam proses administrasi pembayaran biaya pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dilakukan oleh bagian keuangan dan kepegawaian, yaitu menentukan biaya pendidikan yang besarnya sudah ditentukan oleh pihak fakultas, sehingga mahasiswa / peserta didik harus menyetujui besaran nominal yang diberikan oleh pihak fakultas karena pemberlakuan sistem pembayaran adalah secara *Official Assessment* (ditentukan oleh pihak fakultas), dimana pelaksanaannya adalah berdasarkan atas surat keputusan Rektor Universitas Brawijaya untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan pemberian tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam pelaksanaannya penarikan biaya pendidikan secara *Official Assessment System* adalah sudah tersistem dan disesuaikan dengan kebutuhan biaya selama menjalankan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sehingga penerapan dari pelaksanaan *Official Assessment System*

tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

### **D.3. Kendala Serta Hambatan Dalam Pelaksanaan *Official Assessment System* Dalam Administrasi Pembayaran Biaya Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang**

Kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan adalah adanya kebijakan penundaan pembayaran biaya pendidikan. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk terciptanya suatu fleksibilitas yang baik demi terciptanya pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan koridor Pancasila, yaitu keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi mahasiswa / peserta didik yang mungkin kurang mampu. Akan tetapi bila ditinjau dari segi administrasi hal tersebut terlihat jelas merupakan suatu hambatan karena akan merubah perkiraan pembukuan biaya pendidikan yang seharusnya diterima, yaitu analisa pendapatan berdasarkan jumlah mahasiswa dan kewajiban pembayaran yang harus dilunasi yang seharusnya berbanding lurus tidak akan terpenuhi karena adanya penundaan. Namun demikian hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan perubahan monitoring data dengan satu syarat mahasiswa / peserta didik harus memenuhi pembayaran tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam pemberian penundaan untuk melakukan pelunasan pembayaran.

## **E. PENUTUP**

Aturan pelaksanaan dan penerapan *Official Assessment System* dalam administrasi pembayaran biaya pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang adalah sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku, yaitu dari Keputusan Rektor Universitas Brawijaya yang dikeluarkan dengan mengingat dan menimbang aturan - aturan serta keadaan riil yang ada di Universitas Brawijaya mengenai kebutuhan anggaran untuk pendidikan, sehingga dasar dari penerapan *Official Assessment System* tersebut adalah sudah sesuai dengan *rule* yang ada. Sedangkan mengenai pelaksanaannya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya masih ada beberapa hambatan, diantaranya adalah adanya penundaan pembayaran biaya pendidikan yang sebenarnya adalah suatu kebijakan baik yang diberikan oleh pihak fakultas, akan tetapi secara administratif hal tersebut menimbulkan kerumitan dalam pembukuam mengenai biaya yang seharusnya diterima, namun demikian hal tersebut dapat diatasi dengan syarat mahasiswa yang mengajukan penundaan pembayaran dapat konsisten melakukan pelunasan sesuai waktu yang telah ditentukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Abdulkadir Muhammad.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung:Citra Aditya Utama

Amiruddin,S,H dan H. Zainal Asikin S.H. 2003.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta:Raja Grafindo Persada

R. Santoso Brotodhihardjo S.H. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung:Refika Aditama

### **Undang-undang**

Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

### **Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, *(diakses 18 april 2013)*

Ensiklopedia Nasional Indonesia, [http:// WordPress.com](http://WordPress.com), *(diakses 18 April 2010)*